

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menjadi penting dan vital peran sebuah kaderisasi pada sebuah lembaga organisasi baik organisasi laba maupun nirlaba. Kaderisasi erat kaitannya dengan bagaimana sebuah organisasi berjalan kedepannya, dengan sumber daya manusia yang baik tentu akan sangat mempengaruhi kesuksesan tujuan sebuah organisasi. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak yang harus dimiliki setiap badan organisasi bibit yang harus tumbuh dan dirawat sehingga menghasilkan tunas-tunas yang dapat membangun kerja dan berkelanjutan sesuai cita organisasi.

“Kau (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”. (Q.S Ali-Imran : 110).

Kaderisasi suatu organisasi dapat diambil dua arah secara garis besarnya, terdapat subjek dan objek. Subjek kaderisasi ialah orang atau sekelompok orang yang melakukan penyelenggara kaderisasi pada sebuah organisasi sesuai AD/ART dan visi misi sebuah organisasi tersebut.

Sedangkan objek ialah sasaran kaderisasi yakni calon kader. Tentu model kaderisasi setiap organisasi mengenai proses, selektif, dan kebutuhan pasti berbeda-beda terhadap calon kader yang akan masuk organisasi tersebut. Partai politik sebagai salah satu organisasi memiliki instrumen penting dalam menciptakan sosok pemimpin yang meinterpretasi citra partai terhadap khalayak umum atau masyarakat.

Partai politik Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki landasan ideologi Islam sebagai arah dan tujuan dalam berpolitik. Tentu ideologi ini menjadi karakter partai yang mana kader harus memiliki sikap dan semangat berlandaskan politik Islam agar terbentuknya calon pemimpin Islami di masyarakat.

Al Mawardi yang dikutip dari Muhammad Iqbal (2010: 20), Pemikiran politik Islam menurut Al Mawardi pada bahwasannya penguasa ialah pelindung agama. Dialah yang melindungi pemikiran-pemikiran sesat yang merusak kemurnian agama, mencegah muslim dari kemurtadan, dan melindunginya dari kemungkaran. Bagi Al-Mawardi, karena ada hubungan timbal balik antara agama dan penguasa, wajib hukumnya bagi umat Islam mengangkat penguasayang beribawa dan tokoh agama sekaligus. Dengan demikian, agama mendapat perlindungan dari kekuasaan dan kekuasaan dapat berjalan diatas rel yang sama dengan agama.

Pada dasarnya dakwah merupakan sebuah aktivitas seorang muslim yang mana wajib dilaksanakan walaupun hanya menyampaikan satu ayat. “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada

kebajikan, menyuruh berbuat yang yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S Ali ‘Imran 3:105). Dakwah tidak akan terlepas dari sosok individu tersebut baik itu pemilihan metode, lingkungan, maupun isi dakwah yang dibawanya.

Namun, kita sepakat dakwah akan lebih efektif ketika di jalankan terorganisir yang mana melibatkan kualitas dan kuantitas manusia yang ada, bukankah Nabi Muhammad Saw mencontohkan dalam berdakwah pada masanya setelah berhasil menyeru beberapa orang dikalangannya untuk memeluk Islam. Nabi membentuk tim dari para sahabat kala itu untuk menyerukan ajaran Islam di Jazirah Arab. “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Q,S As-Saff 61:4).

Dakwah yang terorganisir dengan model kepemimpinan yang baik seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw niscaya menjadi model kepemimpinan yang tak terbantahkan di kalangan setiap individu muslim maupun non muslim. Hingga hari ini studi-studi kepemimpinan tidak akan lepas dari figur yang luar biasa sebagai pemimpin yang ideal dan itu ada pada diri Nabi.

Pemimpin ideal dalam Islam erat kaitannya dengan Nabi Muhammad Saw. Beliau adalah pemimpin agama dan juga negara. Karakteristik kepemimpinan Nabi yang sudah sangat dikenal sebagai sifat kenabian, yakni (sidiq, amanah, fatanah, tabliq).

Beberapa ciri penting yang juga menggambarkan kepemimpinan dalam Islam sebagai berikut. Pertama, setia, pemimpin harus setia terhadap Allah SWT. Kedua, tujuan pemimpin dalam Islam melihat suatu tujuan dalam organisasi bukan saja berdasarkan kelompok melainkan juga dalam ruang lingkup tujuan Islam yang lebih luas. Ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam pemimpin terikat akan syariat Islam dan adab-adab dalam Islam terutama terkait kepada pihak oposisi yang tidak selalu berjalan sepaham. Keempat, Pengembalian amanah pemimpin menerima tanggung jawab dan amanah dari Allah SWT dan dapat menjadi panutan bagi kelompoknya. Kelima, tidak sombong (*Tawadhu*) pemimpin harus sadar hanya Allah SWT semata yang berhak sombong dan dengan kerendahan hati dalam tugas memimpinnya. Keenam, disiplin pemimpin harus konsisten dan konsekuen memegang teguh janji dan ucapannya dalam perbuatan, karena ia menyadari Allah SWT selalu mengawasinya walau berusaha untuk menyembunyikannya (Veithzal Rivai 2004: 72).

Al-Qur'an juga berbicara tentang kepemimpinan Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa 4 : 59. "Hai orang-orang yang beriman, taatlilah Allah dan taatlilah Rasul (Nya), ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Konz dan O'Donel (1989-157), mengatakan seorang pemimpin harus memiliki keahlian manajerial dan memahami hal-hal yang sifatnya teknis agar memudahkan ia mengarahkan dan membina anak buahnya. Ia harus memiliki keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, membangun relasi dan bersosialisasi, sehingga kepemimpinannya berjalan efektif. Ia juga harus memiliki *human realitation skill*. Yaitu, pandai membuat relasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Hikmat, 2009: 254).

Pemimpin dan manajerial yang baik akan membentuk suatu perencanaan tujuan yang jelas dan matang. Pemanfaatan sumber daya manusia sesuai kealiannya akan mempermudah aktivitas dakwah. Sedangkan hasil dari elemen terorganisir salah satunya dengan politik, salah satu aktivitas politik ialah memilih suatu pemimpin yang nantinya memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengamnbil keputusan di masyarakat. Ketika aktivitas politik berkesinambungan dengan upaya dakwah yang diemban maka seorang pemimpin akan dapat senantiasa mengambil keputusan dengan kekuasaan dan wewenangnya sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang jelas menuntun dan menjadi pedoman manusia kepada masyarakat ideal.

Pentingnya citivas akademika memahami peran dan fungsi organisasi politik yang dapat sepenunhaya selektif dalam menentukan model kaderisasi kader politik mereka. Partai politik seidealnya memberikan peluang siapa saja untuk masuk, loyal, berwawasan tinggi, berjiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, dan siap berhadapan dengan masyarakat.

Pada dasarnya, pola rekrutment dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan, sampai dengan penempatan atau penugasan kader-kader partai dalam jabatan strategis (Azwar, 2008: 3).

Rekrutment politik dilaksanakan secara terbuka, yang mana setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk menduduki suatu jabatan politik. Sebaliknya di negara yang tidak demokratis rekrutment politik biasanya dilakukan secara tertutup. Peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu saja (Afran Gafar, 1999: 155-156).

Indonesia menganut asas demokrasi dalam berpolitik. Namun, sering kali partai dalam penerepaanya longgar tentu banyak faktor diantaranya sumber daya manusia yang minim dan ekonomi yang lemah. Indonesia pun dapat dikatakan sebagai negara berkembang. Di negara berkembang keadaan politik sangat berbeda satu sama lain; begitu pula keadaan partai politiknya menunjukkan sekali banyak variasi. Partai politik berhadapan dengan berbagai masalah seperti kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, pembagian pendapatan yang timpang dan buta huruf yang tinggi. Beban yang diletakan atas pundak partai sering kali terlalu berat dan dihadapkan harapan-harapan yang terlampau tinggi pada partai politik (Miriam Budiarjo 2008: 413).

Dengan begitu banyak partai yang akan mendekati individu-individu yang memiliki ekonomi kuat sedangkan konsep kepemimpinan yang ia tawarkan lemah dan cenderung memanipulasi partai dan masyarakat. Akademik melihat ini sebagai gejala sosial yang berkembang ditengah dunia perpolitikan di masyarakat, perlu nalar yang kritis dan siap mengawal setiap partai politik dalam bersikap menentukan arah model kaderisasi anggota mereka yang nantinya menjadi pemimpin baik internal dan lebih luas lagi di masyarakat.

Tabel 1.1

Gambaran Data Dana Pemilihan Anggota Legislatif 2014

Hasil Laporan Partai Pada KPU

No.	Nama Partai	Total Anggaran (Rp)
1	Nasdem	277.615.341.328
2	PKB	244.000.000.000
3	PKS	122.000.000.000
4	PDIP	404.730.519.590
5	Golkar	402.000.000.000
6	Gerindra	435.000.000.000
7	Demokrat	309.000.000.000
8	PAN	217.900.000.000
9	PPP	157.000.000.000
10	Hanura	374.000.000.000
11	PBB	71.300.000.000
12	PKPI	52.900.000.000

(www.kompasiana.com di akses pada 8 Juli 2018).

Berdasarkan hal tersebut mengenai model kaderisasi partai politik Islam yang harus berjalan semestinya, maka dalam hal ini merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal tersebut dan melakukan penelitian di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat (DPW PKS JABAR) yang mana nantinya diharapkan dapat menjadi bahan sumber rujukan untuk aktivitas partai politik Islam lainnya dan umum mengetahui model kaderisasi partai PKS ataupun lainnya. Dengan berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul “Model Kaderisasi Anggota Partai Politik Islam Dalam Membentuk Pemimpin Islami”.



B. Fokus dan Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana model kaderisasi sebenarnya partai politik. Khususnya partai politik yang berlandaskan ideologi Islam dalam

hal model kaderisasi yang dilakukan agar dapat membentuk atau meregenesasi pemimpin Islami sesuai ideologi partai Islam.

1. Apa saja tugas pokok dan fungsi bidang kaderisasi DPW PKS Jawa Barat?
2. Bagaimana proses tahapan dan tingkatan sistem model pengkaderan PKS dalam pelatihan intensif yang *marhalah* (berjenjang) ?
3. Bagaimana kaderisasi partai politik Islam PKS dalam membentuk pemimpin Islami?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi bidang kaderisasi DPW PKS Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui proses tahapan dan sistem model pengkaderan PKS dalam pelatihan yang *marhalah* (berjenjang).
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan data dalam membentuk kader pemimpin Islami bidang kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan dunia lembaga perpolitikan Islam, khususnya yang berkenaan mengenai model kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai dengan ideologi partai politik Islam.

- a) Secara khusus penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu Manajemen Dakwah dan model kaderisasi DPW PKS Jawa Barat.
- b) Turut ambil dalam menyumbang pemikiran konstruktif dalam kaderisasi yang membentuk pemimpin Islami.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi DPW PKS Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam hal melaksanakan kegiatan model kaderisasi anggota partai guna membentuk pemimpin Islami.

- a) Bagi peneliti, penelitian ini memperdalam teori dan berusaha menerapkannya dalam realitas sosial di lapangan.
- b) Bagi DPW PKS Jawa Barat dapat menjadi bahan informasi maupun referensi dalam membangun model kaderisasi.
- c) Bagi Fakultas Dakwah dan Kominiasi UIN Sunan Gunung Djati, dapat menjadi bahan pembelajaran serta sumbangan ilmu pengetahuan bagi bidangnya untuk penelitian di masa mendatang.

E. Landasan Pemikiran

Negara kita merupakan negara demokratis dalam asas berpoloitik, yakni demokrasi Pancasila yang lahir atas dasar kemajemukan bangsanya dan merupakan salah satu negara berkembang. Dari sekian banyak negara berkembang negeri ini tumbuh dan bermetamorfosa menjadi salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dengan begitu, Indonesia memiliki sosial kultural yang khas, yakni sebagai salah satu penduduk muslim terbesar dan ideologi Pancasila.

Hal ini memiliki potensi, bahwasannya partai politik Islam dapat berbicara banyak di negara in. Menilai muatan demokratis sangat kental dengan ajaran Islam. Partai politik manapun merupakan salah satu implementasi organisasi. Terdapat rekrutment atau kaderisasi sebagai tonggak internal agar tubuh organisasi atau partai terus berjalan.

Rekrutment memiliki tiga tahapan ataupun kegiatan, diantaranya: pertama, *staffing, selection, and sosialitations/orientations* (Hadari Nawawi, 2001:169).

Rekrutment atau kaderisasi merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan sumber daya manusia pada suatu organisasi. Partai dalam menentukan kader anggotanya akan melakukan kaderisasi dalam hal membina.

a. Aspek Kaderisasi

Beberapa aspek kaderisasi yang harus di perhatikan antara lain, yaitu (1). Kesehatan/Fisikal, (2). Spritual, keyakinan, nilai dan norma, (3). Mental

berupa moral, empati, dan keahlian, (4). Intelektual dan berwawasan luas, (5). Manajrial berupa kepemimpinan dan keorganisasian.

b. Kaderisasi Partai Politik

Kaderisasi lebih bersifat sebagai proses “intervensi” dari partai politik untuk meningkatkan kualitas individual para anggotanya agar mampu menjalankan fungsi partai. Selain itu, secara eksternal, kaderisasi juga berarti sangat penting bagi tanggung jawab partai dalam melakukan pendidikan politik kepada publik.

Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa calon-calon kader yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki kesetiaan terhadap partai. Ruang lingkup kaderisasi yang ingin dihasilkan ini akan juga ditentukan oleh ideologi dari partai yang bersangkutan.

Agar proses kaderisasi ini dapat terjaga secara terus menerus, maka dibutuhkan pelembagaan kaderisasi atau bidang yang mengurusinya. Ada dua dimensi utama yang penting dicermati dalam rangka melakukan pelembagaan kaderisasi, yang sebenarnya menjadi ciri khas pelembagaan ideologi demokrasi dalam internal partai, yakni dimensi formal dan dimensi politis. Dimensi formal berkenaan bagaimana kaderisasi dapat menyentuh internalisasi nilai-nilai demokrasi dan perjuangan serta tujuan partai butuh realisasikan melalui instrumen program pendidikan dan pembentukan lembaga yang khusus mengelola kaderisasi.

Dengan kata lain ini berkenaan dengan pembentukan sistem formal kaderisasi. Sedangkan dimensi politis menempatkan kaderisasi dalam makna ruang politik baik internal maupun eksternal partai, yakni dapat dikatakan ruang tarik-menarik atau kompetisi berbagai kepentingan atau faksi-faksi internal partai yang rawan konflik terhadap tokoh dan pengaruhnya dalam partai maupun publik. Rekrutment politik pada publik yang harus dimuat berintegritas sesuai tujuan ideal kaderisasi.

Secara spesifik, benturan antara dimensi formal dan politis ini akan diawali dari ketegangan kebutuhan partai untuk menciptakan standar-standar kapasitas, kualifikasi, dan kualitas tertentu bagi para calon anggotanya dan potensi kehendak politis untuk mengabaikannya. Dimensi politis yang muncul di sini sebenarnya juga karena keterkaitan kaderisasi dengan dimensi politis dalam proses rekrutmen. Komitmen untuk melaksanakan kaderisasi tidak cukup dengan hanya mencantumkannya dalam AD/ART. Tentu harus diterjemahkan dalam program-program partai dalam setiap periode dan tingkatan kepengurusan. Komitmen dan keseriusan partai politik dalam melakukan kaderisasi harus bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang kongkret dan dipahami oleh publik. Oleh karena itu, setidaknya komitmen dan tingkat keseriusan itu dapat diukur dengan mencermati beberapa indikator sebagai berikut:

a. Sistem Kaderisasi:

1. Orientasi pengkaderan
2. Kesesuaian materi kaderisasi dengan platform dan program

3. Mekanisme kaderisasi

b. Kelembagaan :

1. Keberadaan lembaga kaderisasi dalam tiap tingkatan kepengurusan partai
2. Penjaluran kader pasca kaderisasi (penjaluran *output*)
3. Adanya trainer yang melaksanakan kegiatan pengkaderan

c. Kuantitas :

1. Jumlah orang yang mengikuti pengkaderan.
2. Jumlah trainer.

d. Kualitas :

1. Tingkat kapasitas keahlian peserta kaderisasi.
2. Karya atau prestasi peserta pasca kaderisasi.

e. Waktu dan Dana :

1. Alokasi waktu yang dialokasikan bagi program-program pengkaderan. Alokasi dana yang dianggarkan untuk program-program pengkaderan.

(Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab 1 Manajemen SDM Parpol, dalam bahan bacaan utama, mata kuliah partai politik, pemilu an legislasi, S2 Politik Pemerintahan UGM).

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) menjalankannya fungsinya selaku partai politik yakni memberikan peluang pada setiap lapisan masyarakat yang siap dan mampu. Dalam hal ini PKS memiliki model dan bidang kaderisasi selaku motor partai yang bergerak membina, menanamkan,

memotivasi dan menyeleksi pengkaderan kader atau anggota untuk dapat mengisi jabatan-jabatan internal maupun publik. Rekrutment politik merupakan suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik berdasarkan kemampuan, kinerja, bakat, serta pengalaman dari kader tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor partisipatif kaum muslimin, ulama, tokoh agama, kaum intelektual, dan tokoh masyarakat.

Pelaksanaan rekrutmen menjalankan fungsi dan tujuannya untuk menghasilkan kader-kader yang kompeten di hadapan masyarakat umum. Perluasan pengkaderan ini menentukan kriteria calon, tahapan atau proses pengkaderan dan tujuan yang diinginkan dari hasil pengkaderan para kader. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kader yang memiliki kualifikasi untuk mengisi jabatan-jabatan strategis partai maupun jabatan-jabatan politis melalui panggung demokrasi pemilu, pilkada, maupun legislatif dengan menghasilkan pemimpin Islami dalam setiap aktivitas politiknya.

PKS terus berupaya untuk dapat memberikan kuantitas dan kualitas peningkatan anggota partainya hal dapat dilihat pada pesta demokrasi dari tahun 2004, 2009, 2014- hingga saat ini. Sehingga, hal ini penting untuk diteliti PKS sebagai partai politik Islam menanamkan ideologi partai kepada setiap kadernya. Hal ini pun mendapat perhatian bagaimana PKS memfasilitasi dan memberikan model yang tepat dalam setiap penjaringan kadernya untuk sesuai dengan yang diinginkan publik, jabatannya dan tentu

dengan ideologi partai Islam di tengah persaingan elektoral dalam memperluas basis massa di masyarakat.

Sebagai partai kader yang memiliki standar rekrutment yang ketat, PKS kemudian akan mewajibkan para kadernya terlibat aktif dalam serangkaian pelatihan intensif. Pelatihan ini di kemas secara berjenjang atau hirarkies (*marhalah*), yang mencakup proses pembelajaran (*ta'lim*), mengasah kemampuan organisasi (*tandzim*), pengembangan karakter dan internalisasi ajaran Islam (*taqwin*). Proses kaderisasi yang berjenjang menunjukkan bahwa PKS menggunakan model organisasi Islamis yang berbasis kohesivitas intensif, bimbingan persuasif dan kebersamaan yang menciptakan harmoni (Muhtadi 2016: 18).

Pada titik inilah, baiat menjadi fase krusial untuk menjaga kode-kode kepercayaan dan mempererat hubungan antar kader (Piazsdesch 2005: 50-51). Jenjang kaderisasi dan keanggotaan partai juga penting untuk memastikan stesel aktif berbasis *grup and grid* berjalan efektif. Empat tingkat tertinggi, yaitu, *paripurna*, *ahli*, *dewasa*, dan *madya* disebut sebagai kader inti yang memiliki hak suara dalam pemilihan anggota Majelis Syuro. Kader inti juga memiliki hak untuk mengisi jabatan-jabatan strategis dalam kepengurusan PKS (Demank 2002: 11).

Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS seorang kader harus mengucapkan baiat secara lengkap dengan mengucap dua kalimat syahadat. Dengan ini baiat secara Islam dan mewajibkan mengikuti *liqo* atau pengajian membuat kader PKS tidak memungkinkan dari golongan non-

muslim. Namun, menurut Munas 2010 PKS membedakan antara anggota dan kader. Kader adalah anggota yang terikat sistem basis kaderisasi keislaman. Sedangkan, anggota adalah semua warga negara Indonesia yang terikat penuh kepada organisasi. Anggota ini bersifat lebih umum dan terbuka bagi siapa pun dan dari golongan manapun.

Secara garis besar *liqo* dibagi menjadi dua. Pertama, *liqo* di kelola oleh *murabbi*. Pesertanya adalah kader tamhidi (kader pemula) dan muayyid (kader muda). Kader muayyid yang berprestasi dan memiliki loyalitas yang tinggi bisa diangkat menjadi seorang murabbi. Kader muayyid yang lulus dengan baik akan mengikuti kegiatan *muayasah* atau kajian matrikulasi. Jika, lulus maka kader tersebut akan diminta dan disuruh melakukan sumpah setia kader inti partai. Setelah di baiat kader ini akan mengikuti *liqo* khusus yang disebut *liqo usari* yang wajib diikuti kader *muntasib* (kader madya), *muntzhim* (kader dewasa), dan ahli. Pembina *liqo usari* disebut *naqib*.

Proses kaderisasi yang berjenjang tersebut diharapkan akan menimbulkan komitmen total dan loyalitas tinggi anggota terhadap partai. Mantan PKS Tifatul Sembiring, menyatakan “kemenangan partai kader tidak akan muncul tanpa loyalitas, loyalitas takkan muncul tanpa kekuatan, kekuatan tidak akan ada tanpa pengorbanan, dan pengorbanan tidak akan ada tanpa keikhlasan”, Nurthasan Zaid (Resepsi PKS, Republika 2005).

(Dilema PKS Suara dan Syariah di akses melalui <http://books.google.co.id> pada 31 Januari 2018).

**Tabel 1.2**

Sistem Model Kaderisasi PKS

JENIS	SUB-JENIS	DEFINISI DAN JENJANG KADERISASI	KETERANGAN
Kader Tamhidi (Pemula)	Pemula Terdaftar	Kader-kader harus menyelesaikan pelatihan tingkat pertama.	Kader tingkat ini, tamhidi terdaftar sebagai anggota tingkat kecamatan (DPC).
	Pemula Terbina	Kategori ini sudah menyelesaikan pelatihan tingkat 1 dan 2. Mereka juga diminta menghadiri Taklim rutin Kader (TRK). Jika lulus tahap ini akan diberi sertifikat SKAP/KTAP	

		(Surat Kelulusan Anggota Pemula/kartu tanda anggota pemula) agar kemudian bisa mengikuti yang disebut Training Dasar 1 (TD)1.	
Kader Muayyid (Muda)		Yakni kader yang berhasil menempuh TD1 dan memperoleh rekomendasi dari instruktur/muarabbi untuk menjadi kader muayyid. Disamping wajib mengikuti TRK dan melaksanakan kegiatan-kegiatan PKS, kader tingkat ini juga diminta untuk mengambil KISP1 (kajian ilmu sosial politik).	Kader tingkat ini terintegrasi sebagai anggota tingkat kabupaten/kota (DPD).

(Dilema PKS Suara dan Syariah di akses melalui <http://books.google.co.id> pada 31

Januari 2018).



c. Model Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Islam pada teori-teori *leadership* dan *management modern* menurut, Muhammad Syafi'i Antonio (2008: 15-23).

Kepemimpinan dan manajemen telah menjadi topik pembicaraan dan pembahasan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW secara jelas menyebutkan dalam salah satu sabdanya, “*Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Seseorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai*

pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin di tengah keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin dan akan ditanya soal kepemimpinannya. Seseorang pelayan atau pegawai adalah pemimpin dalam mengurus harta majikannya dan ia diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya". (H.R Bukhari.

Hampir semua teori kepemimpinan ada pada Muhammad SAW, bukannya mau berapologi, tetapi memang demikianlah adanya. Berbagai teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh *guru leadership, to some extent* ditemukan pada pribadi dan kepemimpinan Muhammad SAW. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Kets de Vries yang menyimpulkan dari penelitian klinisnya terhadap para pemimpin bahwa sebanyak prosentase tertentu dari para pemimpin itu mengembangkan kepemimpinan mereka karena dipengaruhi oleh trauma pada masa kecil mereka.

Muhammad Saw mengalami masa-masa sulit di aktu kecilnya. Di usia dini beliau sudah menjadi yatim piatu. Pada kanak-kanak itu pula beliau harus menggembala ternak penduduk Makkah. Di awal usia remaja beliau sudah mulai belajar berdagang dengan mengikuti pamannya Abu Thalib berdagang ke daerah-daerah sekitar jazirah Arab.

Adapaun menurut Stephen Covey dalam beberapa teori kepemimpinannya konsep kepemimpinan harus memiliki empat fungsi yakni;

- 1) Perintis (*pathfinding*)

Mengungkap upaya sang pemimpin memahami dan memenuhi kebutuhan utama para *stakeholder*-nya, misi dan nilai-nilai yang dianutnya, serta yang berkaitan dengan visi dan strategi, yaitu ke mana dan akan di bawa kesana.

Nabi Muhammad SAW berhasil membangun suatu tatanan dengan memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan universal, semangat kemajemukan dan multikulturalisme, *rule of the law* dan sebagainya. Sistem sosial yang diakui terlalu modern dibanding zamannya itu dirintis oleh Nabi SAW dan kemudian dikembangkan khalifah penerusnya.

2) Penyelaras (*aligning*)

Bagaimana pemimpin menyelaraskan keseluruhan sistem dalam organisasi agar mampu bekerja dan saling sinergis. Sang pemimpin harus memahami betul apa-apa saja dalam bagian sistem organisasi kemudian, ia menyelaraskan bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai visi yang telah digariskan.

Nabi mampu banyak menyelaraskan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya dalam menyiarkan agama Islam dan membangun tatanan sosial yang baik dan modern. Ketika banyak para sahabat yang menolak kesediaan beliau untuk melakukan perjanjian hudaibiyah yang dipandang menguntungkan pihak musyrikin, beliau tetap bersikukuh dengan kesepakatan itu. Terbukti perjanjian tersebut menguntungkan pihak muslim dan pihak musyrikin meminta untuk dihentikan. Beliau juga membangun dan mewarisi banyak sistem kearah yang lebih baik

diantaranya sistem pertahanan, hukum, dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan yang kuat.

3) Pemberdayaan (*empowering*)

Berhubungan dalam upaya pemimpin agar setiap untuk menumbuhkan lingkungan agar setiap orang dalam organisasi mampu melakukan yang terbaik dan selalu mempunyai komitmen yang kuat. Sang pemimpin harus dapat memahami tugasnya beserta sejauh mana menempatkan posisi yang tepat sumber daya manusia yang ada maupun sumber daya yang lain untuk menyelesaikan tujuannya dan akuntabilitasnya.

Sejarah kenabian banyak mengisahkan Nabi SAW dapat mengembangkan potensi para pengikutnya dalam mencapai suatu tujuan. Sebagai contoh, dalam mengatur strategi perang Uhud, beliau menempatkan pasukan pemanah di punggung bukit untuk melindungi pasukan infantri kaum muslim. Beliau juga dengan bijak dapat mempersaudarkan kaum muhajirin dengan kaum anshar dan membuat persaudaraan dan kemajuan di Madinah.

4) Panutan (*modeling*)

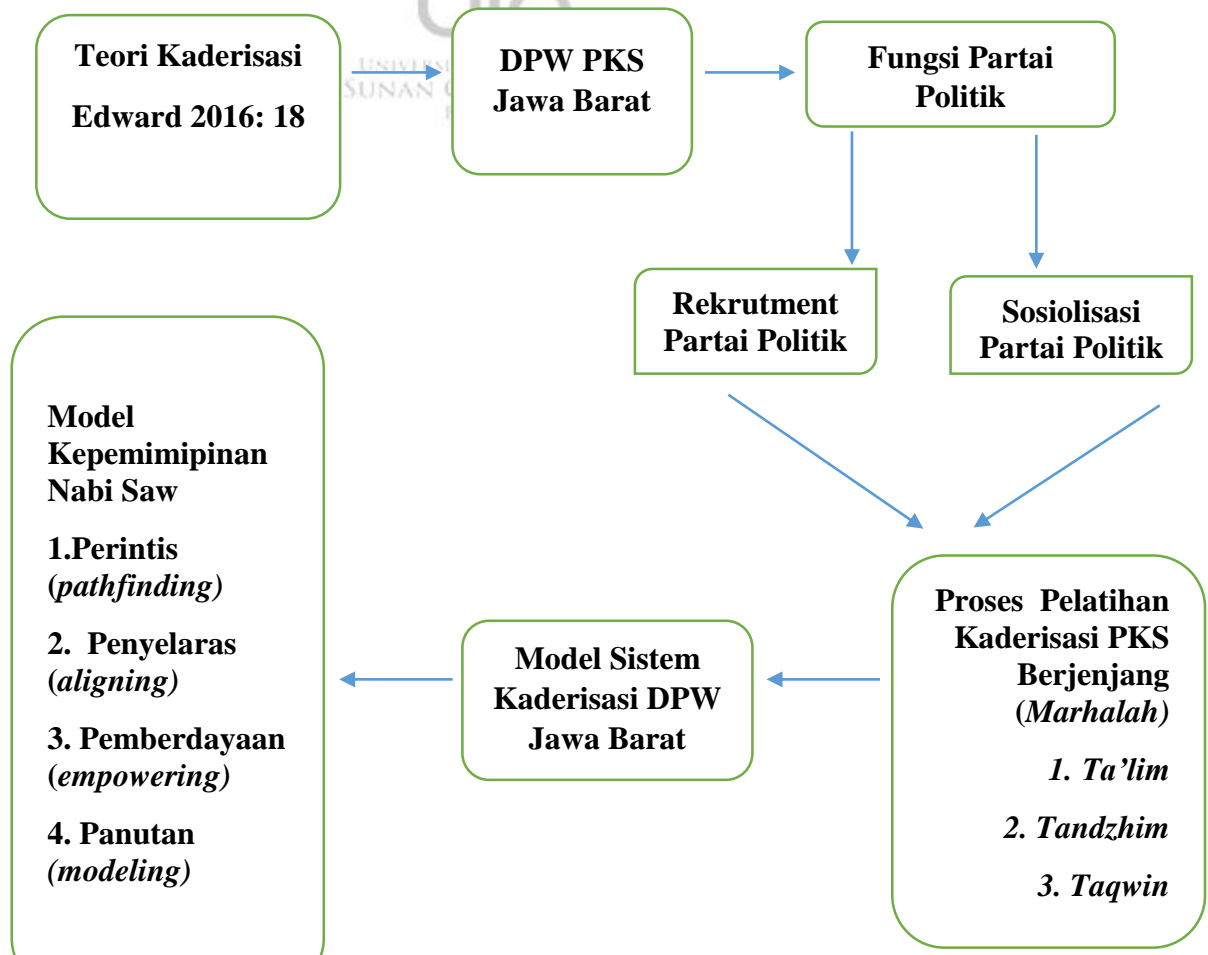
Mengungkap bagaimana pemimpin dapat menjadi panutan bagi yang berada di dalamnya. Bagaimana ia bertanggung jawab atas tutur kata, sikap, perilaku, dan keputusan atau kebijakan yang diambilnya. Sejauh mana dia melakukan apa yang dikatakannya.

Nabi Muhammad SAW dikenal sangat kuat berpegang pada keputusan yang telah disepakati. Beliau juga merupakan seseorang yang

melaksanakan apa yang dikatakannya (*walk the talk*). Beliau juga sangat membenci seseorang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan apa yang dikatakannya.

Masih banyak bukti-bukti kepemimpinan yang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh para *guru leadership* dan manajemen modern yang terdapat pada diri Rasulullah SAW, tentu saja kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi SAW tidak harus menunggu pembenaran dari teori-teori kepemimpinan dan manajemen modern, karena apa yang beliau contohkan telah terbukti berhasil. Sebagai gambaran pada diri Muhammad SAW dapat ditemukan berbagai karakter kepemimpinan yang dirumuskan para ahli dan aplikasinya pada diri Nabi SAW.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini :



Gambar 1.1

Skema Kerangka Berpikir

Model Kaderisasi Anggota Partai Politik Islam Dalam Membentuk Pemimpin Islami (Penelitian Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera)



F. Langkah-langkah penelitian

1. Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid, dan *reliable* (Sugiyono, 2010 : 13).

Dewan Pengurus Wilayah Jawa Barat Partai Keadilan Sejahtera
(DPW PKS JABAR) Jl. Soekarno-hatta No. 538, buah batu, sekajati, Jawa Barat 40286.

Alasan memilih tempat ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang dibutuhkan tersedia di lembaga ini.

- b. Lokasinya terjangkau oleh peneliti sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
- c. Sebelumnya peneliti sudah pernah praktik profesi mahasiswa disana sehingga memiliki relasi dan sumber data pada lembaga.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan pendekatan dekskriptif dan berusaha agar dapat menganalisa model kaderisasi anggota partai politik Islam. Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa model kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat. Analisa data dengan teknik kualitatif (teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi).

- a. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.
- b. Melakukan reduksi data dengan melakukan abstraksi.
- c. Menyusun data dalam satuan yang mana satuan ini kemudian dikategorisasikan sekaligus pengkodean.

Adapun untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penelitian ini, maka proses analisis data kualitatif menurut M.B Milles & A.M Huberman, (1984: 21-23) sebagai berikut :

1. Reduksi Data (difokuskan pada hal-hal yang pokok). Dalam proses reduksi data, dilakukan pencatatan dan dirangkum dengan mencari hal-hal penting yang dapat mengungkap tema permasalahan.
2. *Display* (kategorisasi)

Mengategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti dengan cara membuat berbagai macam matriks, grafik, *network*, dan *charts*.

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Dari data yang diperoleh peneliti akan mencoba mengambil kesimpulan yang masih sangat tentatif, kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih *grounded*. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan dan data-data baru untuk memungkinkan memperoleh hasil penelitian.

3. Jenis Data dan Sumber Data

- a. Data primer merupakan data suatu objek atau dokumen-dokumen mentah dari pelaku yang di sebut "*first-hand information*". (Ulber, 289 : 2012).

Dalam penelitian ini data diperoleh dari observasi dan wawancara di kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat (DPW PKS Jawa Barat :

- 1) Kepala Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Barat Bapak Hadian Febrianto.
- 2) Kepala Deputi Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Barat Bapak Agus Gunadi.

- 3) Sekretaris DPW PKS Jawa Barat Bapak Yana.
- 4) Kepala Bidang Humas DPW PKS Jawa Barat Bapak Agus Widodo.
- 5) Anggota Kader PKS Kota Bandung Bapak Indra.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari tangan kedua yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Ulber, 291 : 2012).

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari penelitan sebelumnya berupa karya ilmiah dan dapat diperoleh dari hasil dokumentasi di Dewan Penguurus Wilayah PKS Jawa Barat serta jurnal-jurnal iliah yang memiliki korelasi dengan model kaderisasi suatu partai. Adapun seperti kajian pustaka, jurnal ilmiah, dan elektronik/internet yang dianggap oleh peneliti dapat mendukung proses analisa data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Obeservasi

Dewi Sadiyah (2015: 122), Observasi ialah teknik yang dilakukan dengan melihat gejala serius dan sisitematis yang mempunyai ciri spesifik terhadap fenomena sosial dan alam dengan cara pengamatan, perekaman dan pencatatan. Observasi dilakukan di lokasi penelitian yakni Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Barat.

b. Wawancara Terstruktur

Wawancara adalah teknik penelitian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan antara peneliti dan responden terkait topik pembahasan untuk

mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan peneliti (Dewi Sadiyah, 2015: 123). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak internal Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya serta menghubungkannya dengan fenomena lain (Dewi Sadiyah, 2015 : 91). Dalam hal ini hasil rekaman, video, foto dan catatan file yang ada dan dilakukan di kantor Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Barat.

5. Teknik Penentuan Keabsahan data

Menurut Sugiyono, (2007 :23-25) keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut :

- a. Pengujian kredibilitas,
- b. Dependabilitas,
- c. Proses dan,
- d. Hasil penelitian.

